

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV GAMBARAN UMUM

### A. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

#### 1. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana terdiri Dari 3 Bidang, Masing-Masing Terdiri Dari 3 Seksi Yaitu:<sup>50</sup>

- a. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
  1. Seksi Advokasi dan Penggerakan
  2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLBK dan Kader KB
  3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
- b. Bidang Keluarga Berencana
  1. Seksi Distribusi Alkon
  2. Seksi Jaminan Pelayanan KB
  3. Seksi Pembinaan Kesetaraan KB
- c. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
  2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia
  3. Seksi Bina Ketahanan Remaja

#### 2. Visi & Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Visi  
**“Mewujudkan Keluarga Kecil Sejahtera, Berkeadilan dan Madani di Kota Dumai”**
- b. Misi
  1. Mewujudkan keluarga sejahtera melalui peran aktif masyarakat dalam menanggulangi masalah reproduksi dan ekonomi dalam keluarga.

<sup>50</sup>Hasil data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pada tanggal 13 September 2017 pukul 10:00 WIB di Dumai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

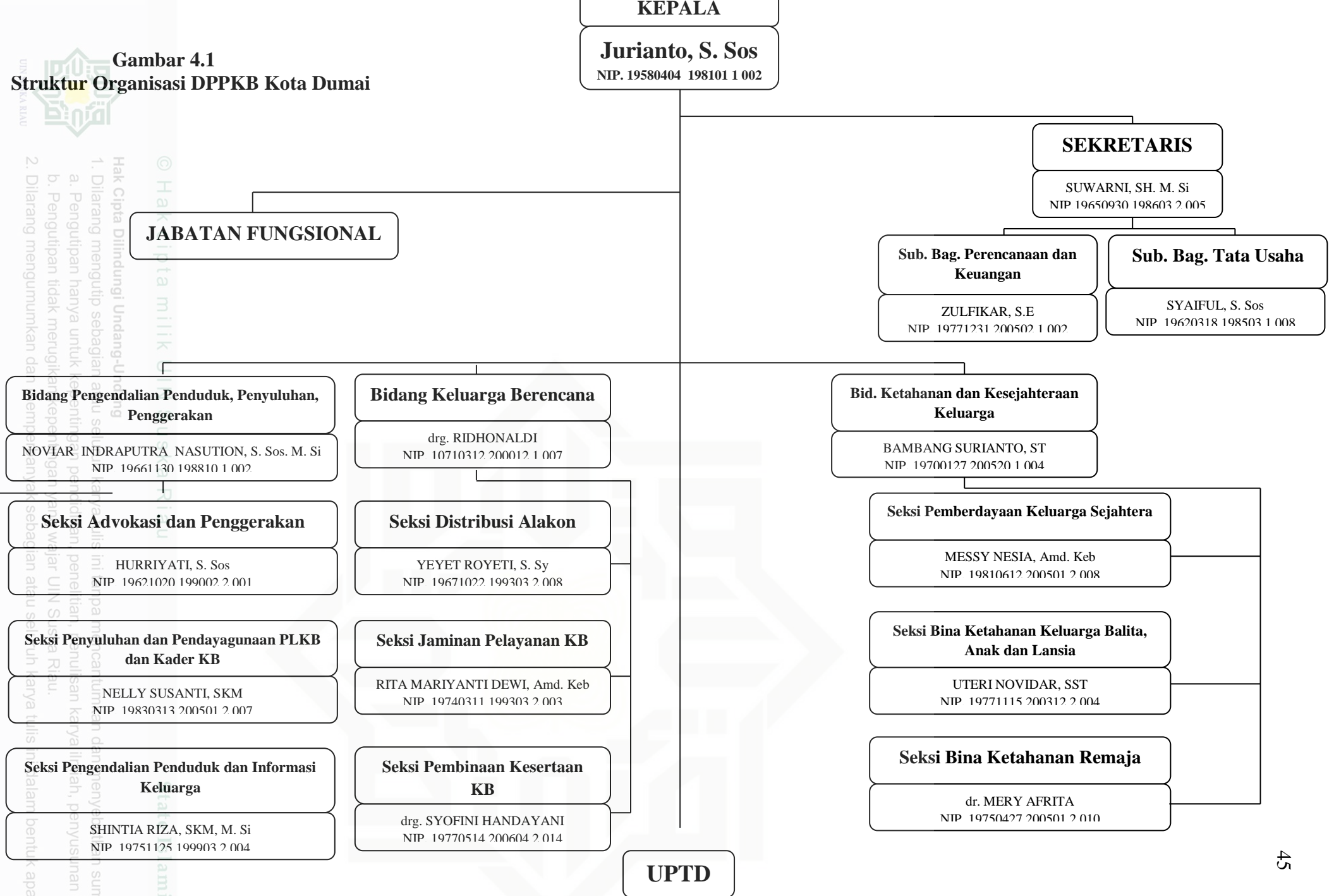
2. Melaksanakan Pemerataan Pelayanan Kontrasepsi Dan Melindungi Hak Reproduksi Dengan Prioritas Pada Masyarakat Ekonomi Lemah Dan Daerah Yang Sulit Dijangkau.
3. Meningkatkan Sistim Informasi Keluarga Yang Lebih Akurat dan Akuntabel Melalui Pendataan Keluarga.
4. Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang semakin efektif.

### 3. Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 Kota Dumai

- a. Program Keluarga Berencana<sup>51</sup>
  1. Pelayanan KIE
  2. Pembinaan keluarga berencana
- b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak
  1. Penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak
  2. Pengembangan sistim informasi gender dan anak
  3. Pembinaan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan PUG
- c. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
  1. Forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
- d. Program Pelayanan Kontrasepsi
  1. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

<sup>51</sup>Hasil data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pada tanggal 13 September 2017 pukul 10:00 WIB di Dumai

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi DPPKB Kota Dumai**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Keluarga Berencana<sup>52</sup>

### 1. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- a. Pengelolaan jaminan pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga serta pemberdayaan ekonomi keluarga.
- b. Pengendalian program kesehatan reproduksi remaja.

### 2. Kelembagaan Data dan Informasi

- a. Pelaksanaan pengelolaan data, pengolahan teknologi dan pelayanan informasi serta dokumentasi.
- b. Pelaksanaan kegiatan pembentukan, pengembangan dan pembinaan kelembagaan.
- c. Pelaksanaan kegiatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan data dan informasi lembaga.

### 3. Cakupan Sasaran

- a. Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif

Keberhasilan/tercapainya pencapaian indikator kinerja tersebut disebabkan oleh pentingnya bagi suatu keluarga yang merupakan Pasangan Usia Subur (PUS) dalam ber-KB yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan dimotivasi/didukung oleh penyuluh dan petugas lapangan KB dengan target 80% dan tercapai realisasi sebesar 103%.

- b. Cakupan PUS yang ingin berKB tidak terpenuhi (*Unmet need*)

Tidak berhasilnya pencapaian indikator kinerja tersebut disebabkan oleh usia perkawinan yang terlalu muda, pendidikan wanita yang rendah, jarak ke layanan dan diskriminasi gender terhadap pemilihan jenis kelamin anak adalah karakteristik demografi yang menentukan tingginya kebutuhan KB yang tidak terpenuhi. Terdapat perbedaan karakteristik demografi dalam unmet need

<sup>52</sup>Hasil data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pada tanggal 13 September 2017 pukul 10:00 WIB di Dumai

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelayanan keluarga berencana untuk pembatasan dan penjarangan kelahiran.

- c. Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

Tercapainya pencapaian indikator kinerja tersebut disebabkan kontinuitas dilaksanakannya kegiatan pelayanan IBI KB KES, TNI Manunggal KB KES, Bhayangkara KB KES, PKK KB KES dan Pelayanan KB masyarakat kurang mampu di 2 daerah sulit sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatnya peserta akseptor KB.

#### 4. Pengertian Kampung Keluarga Berencana (KKB)

Kampung keluarga berencana (KB) merupakan satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Tujuan umumnya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Tujuan khusus dari kampung keluarga berencana, yaitu:<sup>53</sup>

- a. Meningkatkan peran pemerintah, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan masyarakat untuk menyelenggarakan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan.
- c. Meningkatkan jumlah peserta KB aktif modern.

<sup>53</sup>Hasil data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pada tanggal 13 September 2017 pukul 10:00 WIB di Dumai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja.
- e. Meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui Kelompok UPPKS.
- f. Menurunkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- g. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- h. Meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah.
- i. Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung.
- j. Meningkatkan sanitasi dan lingkungan kampung yang sehat dan bersih.
- k. Meningkatkan kualitas keimanan para remaja/mahasiswa dalam kegiatan keagamaan (pesantren, kelompok ibadah/kelompok doa/ceramah keagamaan) di kelompok PIK KRR/remaja.
- l. Meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air para remaja/mahasiswa dalam kegiatan sosial budaya (festival seni dan budaya, dan lain-lain) di kelompok PIK KRR/mahasiswa dan seterusnya.

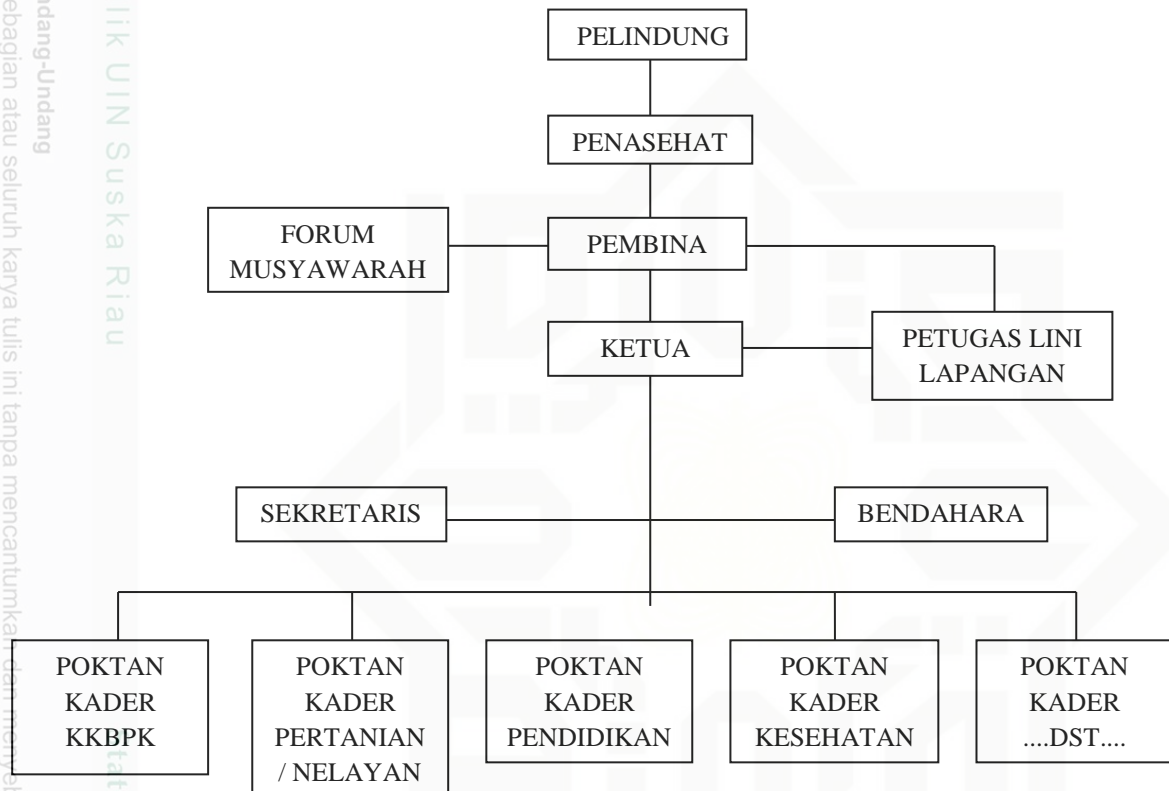
Sasaran dalam kampung keluarga berencana, yaitu: keluarga, remaja, penduduk lanjut usia (lansia), pasangan usia subur (PUS), keluarga dengan balita, keluarga dengan remaja, keluarga dengan lansia, sasaran sektor sesuai dengan bidang tugas masing masing.

Dua kriteria utama yang wajib dipenuhi dalam pemilihan dan penetapan pembentukan kampung KB: Jumlah Pra-KS dan KS-1 (miskin) di atas rata-rata Pra KS- dan KS-1 tingkat desa/kelurahan dimana kampung tersebut berada, jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi.

Setelah terpenuhi dua kriteria utama pemilihan dan pembentukan kampung KB, maka selanjutnya dapat memilih salah satu atau lebih kriteria wilayah berikut: kumuh, pesisir/nelayan, daerah aliran sungai

(DAS), bantaran kereta api, kawasan miskin (termasuk miskin perkotaan), terpencil, perbatasan, kawasan industri, kawasan wisata, padat penduduk

**Gambar 4.2**  
**Struktur Organisasi Kampung KB<sup>54</sup>**



## 5. Tahapan Pembentukan Kampung KB

### a. Komitmen

- 1) Bupati/Walikota
- 2) Sektor terkait
- 3) Camat
- 4) Kepala Desa/Lurah
- 5) Ketua RW/RT
- 6) Masyarakat

### a. Profil Wilayah Calon Kampung KB:

- 1) Luas dan letak Geografis wilayah

<sup>54</sup>Hasil data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pada tanggal 13 September 2017 pukul 10:00 WIB di Dumai

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Kesesuaian dengan kriteria wilayah pembentukan Kampung
  - 3) Data demografi wilayah Kampung KB
  - 4) Data Keluarga Berencana
  - 5) Data Sosial Ekonomi
- b. Proses Penetapan
- a) Rapat penetapan wilayah Kampung KB, dilaksanakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi dengan Bupati/Walikota dan Kepala SKPD KB.
  - b) Penyusunan Struktur Organisasi Kampung KB oleh SKPD KB dan disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota.
  - c) Rekapitulasi wilayah Kampung KB beserta SK Struktur Organisasinya dikirimkan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi kepada Kepala BKKBN
- c. Penyediaan Data Dan Informasi<sup>55</sup>
- 1) Data anggota Keluarga/Data Individu.
  - 2) Data dan Informasi yang terkait dengan cacatan sipil pada lokasi Kampung KB.
  - 3) Data dan informasi Kelompok Kegiatan (Poktan) Kader per-Bidang
- Manajemen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mensosialisasi program kampung keluarga berencana (KB) menggunakan fungsi-fungsi manajemen yaitu membuat perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Bentuk perencanaan yang dilakukannya disini adalah melakukan pembinaan, mengadakan pelatihan, dan lain sebagainya. Didalam pengorganisasian membentuk tim yang akan diturunkan dilapangan. Didalam penggerakan dibuat suatu strategi untuk mensukseskan program kampung keluarga berencana ini. Dan yang terakhir ialah pengawasan, setelah dilakukan sosialisasi tim kembali lagi melakukan survey untuk mengetahui sebagaimana berjalannya program tersebut.

<sup>55</sup>Hasil data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pada tanggal 13 September 2017 pukul 10:00 WIB di Dumai